

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Brunei

Syukri

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
syukri771980@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i1.675

Received : 22/05/2023

Revised : 09/06/2023

Accepted : 12/06/2023

Published : 14/06/2023

Abstract

The purpose of this research is to analyze Brunei's Islamic Education Policy. The method used in this study is a qualitative method used in this study by document review. This research is called a literature survey, which examines journals, books, research reports, journals and other literature related to the discussions discussed in the research. The results of this study are that basically the education system in Brunei Darussalam starts from kindergarten when children are 5 years old, they are required to enter kindergarten for one year before being accepted into elementary school. Brunei Darussalam new vocational schools were introduced after students graduated from junior high school. In the upper secondary education system in Brunei, students can complete their education a year faster, which lasts for two years. Furthermore, in Brunei Darussalam after completing the high school level students will enter pre-university education for 2 years.

Keywords: Analysis, Policy, Islamic Education, Brunei.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Pendidikan Islam Brunei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan telaah dokumen. Penelitian ini disebut survei literatur, yaitu mengkaji jurnal, buku, laporan penelitian, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah Pada dasarnya sistem pendidikan di Brunei Darussalam dimulai sejak Taman Kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun, mereka diwajibkan memasuki TK selama satu tahun sebelum diterima di SD. Brunei Darussalam sekolah kejuruan baru diperkenalkan setelah siswa tamat SLTP. Sistem pendidikan menengah atas di Brunei, siswa dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat, yaitu berlangsung selama dua tahun. Selanjutnya, di Brunei Darussalam setelah menyelesaikan jenjang SLTA para siswa akan memasuki pendidikan pra universitas selama 2 tahun.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan Islam, Brunei.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan indikator penting dan awal kemajuan dan kemunduran suatu negara. Pendidikan menghasilkan manusia yang berkualitas, kompeten dalam berbagai bidang, berakhlak dan berkarakter. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya¹. Sumber daya (SDM) didefinisikan sebagai kumpulan orang dalam suatu organisasi yang berkontribusi pada kegiatan organisasi atau semua keterampilan atau potensi penduduk yang tinggal di area tertentu dan karakteristik atau karakteristik demografis, sosial dan ekonomi mereka yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan².

Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur maju atau mundurnya suatu bangsa, dengan bantuan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritualitas, kecerdasan dan keterampilan serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Jika hasil pembelajaran ini gagal, sulit dibayangkan bagaimana kemajuannya. Bagi suatu bangsa yang menginginkan kemajuan, maka pendidikan harus dipandang sebagai kualitas pendidikan, yang juga mempengaruhi perkembangan bangsa, dan setiap negara memiliki kondisi pendidikan yang berbeda, baik sejarah, sistem pendidikan maupun politik³.

Setiap pemerintah nasional melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan mengalokasikan sebagian tertentu dari APBN untuk bidang pendidikan, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan dan peningkatan lembaga dan infrastruktur pendidikan, serta beasiswa. program untuk siswa berprestasi, dll. Skala prioritas bervariasi dari satu negara ke negara lain⁴.

Di antara yang juga mendukung kemajuan pendidikan di tanah air adalah sistem pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, beberapa negara terus mempelajari sistem pendidikannya dengan membandingkan sistem pendidikan negara lain. Dan sistem pendidikan yang ideal adalah yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mencapai jenjang pendidikan yang sama sesuai dengan kemampuannya.⁵ Dengan cara ini pembangunan pendidikan merata dan semua orang senang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode kualitatif yang meliputi telaah dokumen. Dalam istilah Creswell mendefinisikan penelitian ini disebut sebagai pencarian studi kepustakaan dengan mereview jurnal, buku, laporan penelitian, dan literatur lain yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini Penulis

¹Surti Nurpita Sari Herawati, 'Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah Dan Perbankan Islam Di Brunei Darussalam (1984-2015M)', *THAQĀFIYYĀT*, 19.1 (2018), 73–94.

²Haji Awang, Asbol Bin, and Haji Mail, 'Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam', *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 10.1 (2020), 39–56.

³Fikria Najtama, 'Perkembangan Islam Di Brunei', *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 10. September (2018), 407–21.

⁴Durrotul Dea Mahmuda, Rusli Baharudin, and Syafiatul Umma, 'Otokrasi Brunei Darussalam: Aktualisasi Religiusitas Islam Melalui Legitimasi Politik Masa Kini', *Humanistika*, 8.1 (2022), 1–36.

⁵Masuriyati Yahya and others, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 Brunei Darussalam Dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran Dan Harapan', *Afkar*, 16. (Januari-Juni (2015), 61–92.

melakukannya. Pertama, melakukan penelusuran literatur yang sesuai dengan materi yang akan diteliti. Kedua, setelah data terkumpul, penulis menganalisis data sesuai dengan pemahaman penulis saat melakukan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Letak Geografis Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan⁶. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Brunei Darussalam wilayahnya terletak di Barat Daya pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya ±5.765 Km² dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan.

Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas dua pertiganya etnik Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Brunei Darussalam memiliki batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, selatan, dan barat dengan Negara bagian Serawak, Malaysia. Berdasarkan letak astronominya, Brunei Darussalam terletak pada 4° LU- 5° LU dan 114° BT- 115° BT. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.765² km.

2. Sosial Budaya Brunei Darussalam

Sekitar dua pertiga penduduk Brunei adalah Melayu (66,3%). Etnis minoritas utama yang mendominasi perekonomian negara adalah Tionghoa (Han), yang merupakan sekitar 11,2% dari populasi. diikuti oleh masyarakat adat/hari (3,4%) dan kelompok etnis lain (19,1%). Kelompok etnis ini juga mewakili bahasa utama: Melayu, yang merupakan bahasa resmi, dan Cina. Bahasa Inggris juga digunakan secara luas dan ada komunitas ekspatriat yang cukup besar dengan banyak orang Inggris dan Australia⁷. Islam ialah agama resmi Brunei (67%), dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (*terutamanya oleh orang Tiong Hoa*[13%]), agama Kristen (10%), serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil [10%]).

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian kecil yang kaya ini merupakan perpaduan antara perdagangan dalam dan luar negeri, peraturan pemerintah, kesejahteraan dan tradisi desa. Produksi minyak dan gas alam menyumbang hampir setengah dari produk domestik bruto. Pendapatan dari tenaga kerja asing meningkatkan pendapatan dari produksi dalam negeri⁸. Kerajaan menyediakan semua layanan medis dan mensubsidi beras dan perumahan. Para pemimpin Brunei khawatir integrasi ke dalam ekonomi global akan semakin mempengaruhi kohesi

⁶Abd Ghofur, 'Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam', *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7.1 (2015), 53–69.

⁷Hairunnas Isnaini, Septemiarti, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Berunei', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 (2023), 4967–73.

⁸Athoillah Islamy and Afina Aninnas, 'Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia)', *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2020), 102–14.

sosial, meskipun Brunei telah memainkan peran penting dalam transisi tersebut sebagai ketua forum APEC pada tahun 2000. Rencana masa depan termasuk meningkatkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, memperkuat industri perbankan dan pariwisata, dan secara umum memperluas basis ekonomi. Royal Brunei Airlines, sistem penerbangan nasional, berencana menjadikan Brunei sebagai pusat pariwisata internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ini juga menawarkan layanan ke tujuan paling penting di Asia⁹.Perekonomian Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi yang memiliki salah satu pendapatan nasional tertinggi di dunia Satuan mata uangnya adalah dolar Brunei yang setara dengan dolar Singapura. Selain mendukung sektor minyak dan gas, pemerintah Brunei berupaya mendiversifikasi sumber daya ekonominya untuk meningkatkan perdagangan dan industri.

4. Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiaah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

5. Sistem Kurikulum Brunei Darussalam

Model kurikulum sekolah Brunei Darussalam adalah model yang berpusat pada mata pelajaran. Jumlah mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, berkisar antara 7 hingga 9 mata pelajaran. Pada saat yang sama, ada 12 jurusan di sekolah pra-universitas¹⁰. Dewasa ini, dalam perkembangan kurikulum lembaga pendidikan profesi telah dikembangkan bahan kajian yang berkaitan dengan standar kualifikasi kerja (kompetensi) yang penting bagi tuntutan dunia usaha. Hasil pengembangan tersebut saat ini diimplementasikan dalam lembaga pendidikan profesi, yang dikendalikan bersama oleh sekolah dan dunia usaha. Menariknya, bahasa Inggris diajarkan dari taman kanak-kanak hingga kelas 1-3 sekolah dasar¹¹.

Penggunaan dwibahasa mulai dari sekolah menengah (kelas 4-6 sampai SMA), namun beberapa mata pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Melayu, seperti pelajaran agama Islam, seni dan kerajinan, dan Melayu Islam Berjaya (MIB). di sisi lain, matematika, sejarah, sains, dan geografi diajarkan dalam bahasa Inggris.

⁹Nafi Mubarak and Kata Kunci, 'Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu', *Sosio Yustisia*, 1.1 (2021), 127–55.

¹⁰Novidya Yulanda, 'Perbandingan Kurikulum Social Studies Di Korea Selatan Dan Brunei Darussalam', *Research and Development Journal Of Education*, 5.2 (2019), 26–38.

¹¹Ampuan Haji, Brahim Bin, and Ampuan Haji, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : Isu Dan Cabaran Di Brunei Darussalam', *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 6.November (2013), 197–208.

6. Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam

Sejak tahun 2008, Brunei telah mulai melakukan transisi kepada system pendidikan baru yang disebutkan sebagai SPN₂₁, akronim dari system pendidikan Negara abad ke 21¹². SPN₂₁ adalah system pendidikan dirancang untuk memberikan kesempatan dan kelulusan bagi para siswa untuk mencapai setatus pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing, sebagaimana misi meo (kementrian pendidikan) adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh untuk mencapai potensi yang penuh bagi semua¹³.

Sistem ini mulai diterapkan pada siswa tahun 7 (menengah pertama) tahun ajaran 2008, yaitu para lulusan ujian PSR 2007 (semacam unas sd). Kemudian pada tahun 2009 dilakukan transisi bagi siswa tahun 1 dan tahun 4 kepada system ini dan akan diterapkan sepenuhnya pada tingkat dasar pada tahun 2011¹⁴.

a. Pra-pendidikan,

Anak berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki pra-pendidikan dasar. Bahkan pada lembaga pendidikan pra-sekolah swasta bisa di bawah 3 tahun. Kurikulum pada tingkat ini meliputi kelas-kelas bahasa dasar serta aritmatika, kewarganegaraan, dasar pelajaran agama islam, pendidikan jasmani, dan pengembangan bakat yang semuanya diajarkan dengan menggunakan unsur-unsur sekitarnya. Pelajaran diadakan pelajaran diadakan secara informal. Tidak ada periode waktu alokasi khusus per pelajaran karena pengajaran terintegrasi dan disalurkan melalui aktivitas anak-anak.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar berdasarkan SPN₂₁ dibagi menjadi 2 tingkat: tingkat bawah (tahun 1 hingga tahun 3) dan tingkat atas (tahun 4 hingga tahun 6). Semua siswa menjalani kurikulum yang sama pada tahun 1 hingga tahun 3. Bagi siswa yang ingin memasuki sekolah arab maka harus melewati ujian masuk sekolah arab pada tahun 4. Saat mengakhiri masa pendidikan dasar, semua siswa termasuk yang mengikuti sekolah arab, menjalani ujian penilaian sekolah rendah (psr) sebelum memasuki sekolah menengah. Siswa yang gagal dalapsrakan diikutkan dalam ujian pengulangan¹⁵.

c. Pendidikan Menengah

Di dalam SPN₂₁, pendidikan menengah adalah pendidikan 4 atau 5 tahun. Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama pada tahun 7 hingga tahun 8. Pada akhir tahun 8, para siswa mengikuti ujian penilaian menengah bahwa yang diujikan pada tahun ke-3 menengah bahwa berdasarkan hasil pengujian kemajuan pelajar, siswa akan diarahkan ke program pendidikan menengah umum 4 atau 5 tahun (tahun 9 hingga tahun 10 atau tahun 9 hingga tahun 11), dan program pendidikan terapan 5 tahun (tahun 9 hingga tahun 11). Selain itu

¹²Helmiati Susiba, Hairunnas, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional (SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam', *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.2 (2022), 210–19.

¹³Hasbi Abduh, 'Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2016), 1–22.

¹⁴Amran Khaidir Fadil, Suhendra, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara Asean Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal', *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2023), 279–95.

¹⁵Muhammad Yusran, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)', *Jurnal Al-Risalah*, 15.1 (2019), 131–80.

juga terdapat program pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi siswa berkata tau berkecerdasan tinggi dalam bidang olahraga, music, seni petunjukan, dan seni rupa.

Di samping juga menyediakan program pendidikan berkeperluang khusus yang ditunjukkan untuk siswa yang kurang penglihatan dan pendegaran, atau cacat mental, cacat fisik, atau mempunyai kesulitan pembelajaran yang khusus¹⁶. Siswa diberikan kesempatan untuk beralih program semisal dari program pendidikan 4 tahun ke program pendidikan menengah atau sebaliknya, namun tetap dengan pertimbangan hasil pencapaian pembelajaran dan syarat-syarat yang ditentukan. Siswa yang hendak mengakhiri masa pendidikannya akan mengikuti ujian BCGCE peringkat O diakhiri tahun 10 bagi yang mengikuti program pendidikan menengah 4 tahun, atau akhirtahun 11 untuk siswa program pendidikan menengah 5 tahun.

d. Pasca pendidikan menengah

- 1) Technical Collage.
- 2) SekolahKejuruan.

e. PendidikanTinggi

- 1) Technical & Engineering Colleges.
- 2) Perguruan tinggi keperawatan pengiraan anak putri rashidah.
- 3) InstitutTeknologi Brunei (ITB).
- 4) Universitas Brunei Darusalam.

D. Simpulan

Pada dasarnya sistem pendidikan di Brunei Darussalam dimulai sejak Taman Kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun, mereka diwajibkan memasuki TK selama satu tahun sebelum diterima di SD. Brunei Darussalam sekolah kejuruan baru diperkenalkan setelah siswa tamat SLTP. Sistem pendidikan menengah atas di Brunei, siswa dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat, yaitu berlangsung selama dua tahun. Selanjutnya, di Brunei Darussalam setelah menyelesaikan jenjang SLTA para siswa akan memasuki pendidikan pra universitas selama 2 tahun.

¹⁶Mahmuda, Baharudin, and Umma.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Hasbi, 'Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2016), 1-22
- Awang, Haji, Asbol Bin, and Haji Mail, 'Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam', *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 10.1 (2020), 39-56
- Ghofur, Abd, 'Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam', *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7.1 (2015), 53-69
- Haji, Ampuan, Brahim Bin, and Ampuan Haji, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : Isu Dan Cabaran Di Brunei Darussalam', *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 6.November (2013), 197-208
- Herawati, Surti Nurpita Sari, 'Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah Dan Perbankan Islam Di Brunei Darussalam (1984-2015M)', *THAQĀFIYYĀT*, 19.1 (2018), 73-94
- Islamy, Athoillah, and Afina Aninnas, 'Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia)', *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2020), 102-14
- Isnaini, Septemiarti, Hairunnas, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Berunei', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 (2023), 4967-73
- Khaidir Fadil, Suhendra, Amran, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara Asean Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal', *Islamika:Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5.1 (2023), 279-95
- Mahmuda, Durrotul Dea, Rusli Baharudin, and Syafiatul Umma, 'Otokrasi Brunei Darussalam: Aktualisasi Religiusitas Islam Melalui Legitimasi Politik Masa Kini', *Humanistika*, 8.1 (2022), 1-36
- Mubarok, Nafi, and Kata Kunci, 'Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu', *Sosio Yustisia*, 1.1 (2021), 127-55
- Najtama, Fikria, 'Perkembangan Islam Di Brunei', *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 10.September (2018), 407-21
- Susiba, Hairunnas, Helmiati, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional (SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam', *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.2 (2022), 210-19
- Yahya, Masuriyati, Che Zarrina, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam, Sultan Sharif, Jalan Pasar, and others, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 Brunei Darussalam Dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran Dan Harapan', *Afkar*, 16.(Januari-Juni (2015), 61-92
- Yulanda, Novidya, 'Perbandingan Kurikulum Social Studies Di Korea Selatan Dan Brunei Darussalam', *Research and Development Journal Of Education*, 5.2 (2019), 26-38

Yusran, Muhammad, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)', *Jurnal Al-Risalah*, 15.1 (2019), 131-80